

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rasyidah Bulqis
STAI DDI Pinrang

Email: rasyidahbulqis@gmail.com

Abstract.

Absorption of labor is an important problem in national development where the number is increasing from year to year as a result of the increase in population, while the available job opportunities are limited in number, so that the unemployment rate in several cities is increasing. A high level of investment will increase production capacity which will eventually lead to the creation of new jobs. That way, the unemployment rate can be reduced and people's incomes will increase. This research is a quantitative research with secondary data in the 2015-2021 observation period. Data collection in this study uses the documentation method for data on Population 15+ Working, Investment and Minimum Wage obtained from BPS, Department of Manpower and Office of Investment. The collected data is analyzed using multiple linear regression analysis. Overall, the results of multiple linear regression analysis and hypothesis testing can be concluded that partially investment and minimum wages have no significant effect on employment in Indonesia. Simultaneously, it shows that the investment and minimum wage variables have no simultaneous effect on employment in Indonesia. The lack of effect of investment on labor absorption in Indonesia is due to the fact that more investment is channeled into the capital-intensive project sector (services) compared to the labor-intensive project sector, where the capital-intensive project sector absorbs only a small amount of labor. Meanwhile, the minimum wage has no effect on labor absorption because the majority of the working population in Indonesia have received relatively high wages or exceeded the minimum wage. Employment. Absorption of labor in the perspective of Islamic economics is that the government has made various efforts as its responsibility to provide jobs for its people. The essence of Islamic economics in reviewing the power market based on an Islamic perspective shows the potential in generating economic equality in society and realizing prosperity

Keywords: national development, Investment, Minimum Wage

Abstrak.

Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan nasional yang dimana angkanya dari tahun ke tahun semakin bertambah sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas jumlahnya, sehingga tingkat pengangguran di beberapa kota semakin meningkat. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung

pada pembukaan lapangan kerja baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode pengamatan 2015-2021. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk data Penduduk 15+ yang Bekerja, Investasi dan Upah Minimum yang diperoleh dari BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial investasi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Serta secara Simultan menunjukkan bahwa variabel investasi dan upah minimum tidak ada pengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tidak berpengaruhnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia disebabkan karena investasi lebih banyak disalurkan ke sektor proyek yang padat modal (jasa) dibandingkan ke sektor proyek yang padat karya, dimana dalam sektor proyek yang padat modal hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Sedangkan tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja disebabkan karena penduduk yang bekerja di Indonesia sebagian besar telah menerima upah yang relatif tinggi atau melebihi upah minimum. Penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam adalah pemerintah telah melakukan berbagai upaya sebagai tanggung jawabnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Esensi ekonomi Islam dalam meninjau pasar tenaga berdasarkan padangan Islam menunjukkan potensi dalam menghasilkan pemerataan perekonomian di masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan.

Kata kunci: Pembangunan Nasional, Investasi, Upah minimum

LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam beberapa dasawarsa ini, keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup mencipta-kan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Basmar et al., 2021). Angka pengangguran masih saja tinggi terjadi karena adanya pengaruh serikat kerja dan intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum. Sebab lain adalah banyaknya pencari kerja dengan tingkat pendidikan tertentu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja (Woyanti, 2009). Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas negara, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesempatan kerja (Hartman, 2009). Heilbroner menyatakan pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompa suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (Heilbroner, 1982). Sedangkan dampak dari kenaikan permintaan investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan mampu meningkatkan terciptanya kesempatan kerja baru sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan dan permintaan *output* dalam

masyarakat(Mankiw et al., 2007).

Dalam penelitian (Sun'an & Astuti, 2008) tentang analisis investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja mengindikasikan terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi terhadap kesempatan kerja. Sementara kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja. Penelitian-nya tentang penyerapan tenaga kerja menyatakan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, faktor upah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.(Woyanti, 2009) Hasil yang terakhir tidak sesuai dengan teori, karena kebanyakan investor lebih menggunakan padat modal daripada padat karya. Menurut (Afiat, 2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan perubahan struktur terhadap penyerapan tenaga kerja menyatakan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui perubahan struktur ekonomi.

Modal sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penting dalam teori pertumbuhan ekonomi modern (Zanden et al., 2012). Pendidikan merupakan salah satu modal sumber daya manusia.

Dengan menggunakan data empiris BPS Nasional tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih tergolong rendah pada tahun penelitian tersebut.

Rosyidi (Reksoprayitno, 2000) mengartikan secara rinci istilah tenaga kerja kedalam istilah human resource dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Definisi ini semakin meluaskan pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsur-unsur yang berada didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab dan lain-lain. Kerja dan tenaga kerja dalam Islam menjadi kewajiban bagi umat yang mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan tersendiri hingga telah tertulis didalam Al-Qur'an. Firman Allah di surah An-Najm ayat 39 tertulis:

أَسْعَىٰ لِمَا نِإْسَٰلِن سَلَّٰتِي ۗ لَو

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” Menurut ayat ini, tidak ada jalan mudah menuju kesuksesan karena untuk mencapainya dibutuhkan perjuangan dan usaha. Kerja keras sebagai bentuk usaha dan semakin tinggi usahanya maka semakin tinggi pulalah imbalan yang akan diterima. Oleh karena itu dalam Islam mendorong umatnya yang menjadi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas diri baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan juga peningkatan kualitas diri dari sisi moral.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi islam selama periode penelitian.

KAJIAN TEORITIS

A. Upah Minimum

Hal yang paling prinsip dalam kebijakan upah minimum adalah sebagai upaya mewujudkan keadilan. Lebih spesifik lagi bahwa kebijakan upah minimum dimaksud

sebagai upaya perlindungan serta pemberi upah dalam memberikan upah kepada pekerja atau buruh yang baru masuk kerja. (Shintia & Abbas, 2019).

Permasalahan upah minimum terjadi di berbagai negara berkembang, yaitu banyaknya pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa upah minimum mungkin tidak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai instrument dalam distribusi pendapatan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upah minimum di Kabupaten Bandung. Dalam tulisan ini akan dikaji apakah upah minimum efektif sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan (Susanti, 2017) Kebijakan upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun, sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Mutiar Ayu Maulidina, 2018)

Ketentuan mengenai pengupahan tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan menggunakan ketentuan penetapan upah minimum, namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. (Damaryanti et al., 2020)

B. Investasi

Manajemen investasi yaitu proses pengelolaan uang atau aktiva dalam rangka memperoleh keuntungan, sedangkan Portofolio yaitu sekumpulan bentuk investasi uang atau aktiva. Struktur bisnis pengelolaan dana atau uang biasanya menggunakan manajer investasi, manajer investasi yaitu individu yang melakukan pengelolaan portofolio. (Sunaryo, 2019)

C. Pengeluaran Pemerintah

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengeluaran pemerintah yang penyerapannya belum efektif pada program-program yang produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan. (PATEDA et al., 2019) Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. (Purwanti & Rahmawati, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Penanaman Modal, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan serta sumber-sumber data lain yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu: *Common Effect Model*/Model tanpa Efek Individu, Menurut Baltagi (2005), model tanpa efek individu (*common effect*) adalah metode pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan *OLS (ordinary least square)* untuk menduga parameternya. Metode *Ordinary Least Square* atau yang dikenal dengan metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode yang populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linier. Model *common effect* ini mempunyai intersep dan slope yang sama untuk setiap individu, sehingga efek individu tidak akan terlihat. *Fixed Effect Model*/Model Efek Tetap Menurut Baltagi (2005), pada pendekatan model efek tetap, diasumsikan bahwa intersep dan slope dari persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit *cross section* maupun antar unit *time series*. Satu cara

untuk memperhatikan unit *cross-section* atau unit *time-series* adalah dengan memasukkan variabel boneka/semu (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross-section* maupun antar unit *time series*. Pendekatan *fixed effect* menggunakan variabel *dummy* untuk mengestimasi perbedaan intersep sehingga disebut juga model *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). *Random Effect Model*/Model Efek Random Menurut Nachrowi dan Usman (2006) pada *Random Effect Model* perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi lewat *error* dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error* yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada *Random Effect Model* juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen individu, *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan. Dalam menduga model dari data panel, terdapat tiga kemungkinan model yang dihasilkan. Untuk mengetahui model mana yang paling tepat dari ketiga kemungkinan yang ada dapat digunakan statistik uji *Chow* dan *Hausman*. Setelah pemilihan metode dan pembentukan model regresi dilakukan, maka selanjutnya perlu diuji kelayakan suatu model dalam menguji hipotesis yang diajukan. Menurut teorema *Gauss Markov* untuk melihat apakah hasil regresi sudah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), maka perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hubungan negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan kesesuaian teori yang selama ini berlaku. Berdasarkan Aturan Hick-Marshall (Santoso, 2012), jika upah meningkat maka total biaya produksi akan mengalami peningkatan secara proporsional lebih tinggi. Sebagai konsekuensinya, tingkat harga barang juga meningkat lebih tinggi sehingga kuantitas barang yang diminta juga akan mengalami penurunan lebih tinggi, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut (Simanjuntak, 1985), upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu, kenaikan upah akan direspon oleh pengusahadengan menurunkan jumlah tenaga kerja.

B. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori Harrod Domar, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan (Bayu Windayana & Darsana, 2020). Selain itu juga, penelitian ini mendukung teori Partowidagdo yang mengemukakan bahwa investasi dengan sendirinya berkaitan secara langsung dengan terciptanya lapangan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat sehingga angka pengangguran menjadi rendah. Sandi menyatakan bahwa salah satu faktor penunjang pembangunan sektor industri adalah tenaga kerja terampil (terlatih) dalam industri yang bersangkutan. (Romdhoni, 2017)

Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut KSAP, pengelolaan dana bergulir yang dilakukan selama ini terdapat permasalahan yaitu belum dilaksanakannya sesuai dengan praktek manajemen yang sehat sehingga tidak dapat diketahui jumlah dana bergulir yang beredar, berpotensi

kembali dan berpotensi macet (Putri, 2018). Penyebab lain dikarenakan instansi pemerintah sering hanya bertanggung jawab pada saat penyaluran dana bergulir pertama sekali dan beranggapan bahwa dana bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021 bahwa terdapat dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih. Kasus tersebut seperti pemberian fasilitas kredit modal kerja dan pemberian plafon kredit yang melebihi batas nilai maksimum plafon tidak sesuai dalam pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kewajiban debitur atas pokok dan bunga kredit. Selain itu, pemantauan, penyelamatan, dan penyelesaian agunan terhadap kredit macet atau bermasalah belum dilakukan. Selanjutnya, BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK), yaitu porsi kredit produktif kepada UMK lebih kecil dari kredit konsumtif dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPR, realisasi kredit produktif kepada UMK tidak mencapai target, serta BPR dan pihak terkait tidak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian RKT BPR untuk memberikan kredit dan mendorong perekonomian usaha kecil. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lalai mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor di BPR dalam suatu aturan tertulis serta memenuhi setoran modal dasar.

C. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori Keynes dalam Dumaury, mengungkapkan dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. (Irhamni, 2018)

Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih. Pengeluaran pemerintah berupa belanja pegawai untuk tenaga kerja terlatih sebagian besar dibelanjakan untuk tenaga kerja pendidik dan tenaga kerja kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengeluaran pemerintah terbesar pada fungsi pelayanan umum di tahun 2019 dan 2021, sedangkan di tahun lainnya pada fungsi pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada fungsi pariwisata dan budaya memiliki persentase terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian dan dukungan dengan menyediakan lapangan kerja bagi lulusan SMK bidang pariwisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Variabel upah berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik. Pengaruh negatif dari upah minimum sangat dirasakan oleh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yang merupakan mayoritas dari pekerja di Indonesia.

Variabel penyertaan modal daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini disebabkan karena terdapat piutang/pinjaman dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih pada pemerintah daerah maupun pada Lembaga keuangan milik pemerintah daerah belum melakukan upaya

untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK).

Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah sangat dirasakan oleh tenaga kerja. Dan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih, hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota berupa belanja pegawai untuk tenaga kerja terlatih sebagian besar dibelanjakan untuk tenagakerja pendidik dan tenaga kerja kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma. Sedangkan, pengeluaran pemerintah terbesar pada fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum. Selain itu juga, pengeluaran pemerintah fungsi pariwisata dan budaya merupakan persentase terendah sehingga pemerintah kurang memberikan perhatian dan dukungan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK bidang pariwisata.

Saran

Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan terutama terkait dengan penciptaan kesempatan kerja, kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja dan pengupahan, karena pemerintah daerah perlu mengatasi masalah ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha.

Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah maupun Bank Pembangunan Daerah untuk mengatasi masalah dana bergulir yaitu: (1) Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui penerima dana bergulir, besar dana yang telah disalurkan, jatuh tempo dana yang disalurkan, jumlah dana yang telah dibayarkan, dan sisa dana yang belum dibayarkan. (2) Identifikasi penerima dana bergulir. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima dana bergulir bisa ditagih atau tidak bisa ditagih dengan alasan, antara lain: kelompok bubar, pindah alamat, meninggal, gulung tikar, dan lain-lain. (3) Variabel penyertaan modal daerah (investasinon permanen/dana bergulir) belum sepenuhnya dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja, diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan anggaran kepada SKPD terkait untuk pengelolaan dan pemantauan dana yang sedang beredar di masyarakat. (4) Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sehubungan dengan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK), di mana Kepala Daerah selaku pemilik modal berkoordinasi khususnya dalam hal mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor dan memenuhi setoran modal dasar. (5) Diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu wajib belajar 12 tahun dengan melaksanakan pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi daerah secara efektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih menjadi tenaga kerja terdidik maupun tenaga kerja terlatih terutama bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan bidang industri agar para tenaga kerja mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah. Pada akhirnya menarik minat para investor untuk menanamkan modal, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA di Kabupaten/Kota di Indonesia dan realisasi investasi lebih merata serta padat karya yang tidak hanya memprioritaskan pada bidang industri. (6) Pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja terlatih lulusan SMK, sehingga mereka tidak perlu keluar daerah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. (7) Bagi para peneliti lanjutan, berdasarkan kelemahan-kelemahan hasil penelitian ini maka para peneliti lanjutan dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja serta memberikan indikator-indikator yang

spesifik untuk masing-masing variabel agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dari pengaruh masing-masing variabel serta para peneliti lanjutan diharapkan dapat menambahkan periode penelitian

DAFTAR REFERENSI

- Afiat, M. (2012). *Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Universitas Brawijaya.
- Basmar, E., Sartika, S. H., Suleman, A. R., Faried, A. I., Damanik, D., Amruddin, A., Purba, B., Wisnujati, N. S., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan*. Yayasan Kita Menulis.
- Bayu Windayana, I. B. A., & Darsana, I. B. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UMK, INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i01.p04>
- Damaryanti, H., Alkadrie, S. A., & Annurdi, A. (2020). PEMENUHAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.8>
- Hartman, H. C. (2009). Some long-run thoughts on short-term stabilization policy. *International Handbook of Academic Research and Teaching*, 84.
- Heilbroner, R. L. (1982). Terbentuknya Masyarakat Ekonomi, terj. *Sutan Diajung, Jakarta: Galia Indonesia*.
- Irhamni. (2018). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1986-2015 Irhamni. *Pendidikan Dan Ekonomi*.
- Mankiw, N. G., Kneebone, R. D., McKenzie, K. J., & Rowe, N. (2007). *Principles of macroeconomics*.
- Mutiara Ayu Maulidina¹, D. S. P. (2018). PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.
- PATEDA, Y.-, Masinambow, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2019). PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI GORONTALO. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.16455.19.3.2017>
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>
- Putri. (2018). Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Reksoprayitno, S. (2000). Pengantar Ekonomi Makro, Edisi 6. *BPFE. Yogyakarta*.
- Romdhoni, A. H. (2017). PENGARUH INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.107>
- Santoso, R. P. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Shintia, N., & Abbas, S. (2019). PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI

- ACEH. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5091>
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo.
- Sun'an, M., & Astuti, E. (2008). Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat. *IQTISHODUNA*, 3(1).
- Sunaryo, D. (2019). Manajemen Investasi Dan Portofolio. In *Qiara media*.
- Susanti, E. (2017). Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13566>
- Woyanti, N. (2009). Penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 16(01).
- Zanden, J. L., Marks, A. J., & Wahid, A. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: antara drama dan keajaiban pertumbuhan*. Penerbit Buku Kompas.